JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Strategi Pencegahan Serangan Terorisme Terhadap Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur

Maslikan[1], Sapto Priyanto[2],
[1]Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, maslikan@ui.ac.id
[2]Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, maslikan@ui.ac.id

Corresponding Author: maslikan@ui.ac.id [1]

Abstract: *Terrorism presents a multifaceted challenge in today's global landscape. Typically characterized as violent acts directed at civilians to fulfill a group's political or ideological objectives, terrorism seeks to impose its will on those deemed adversaries, demanding recognition and respect for its interests. Indonesia remains vulnerable to the threat of terrorism, notably following the devastating World Trade Center and Bali bombings in the early 2000s. Today, this threat is exacerbated by plans to relocate the Indonesian capital to East Kalimantan. The new capital's proximity to state borders and regions prone to terrorist activities—including areas with convicts, ex-convicts, and sympathizers—raises significant concerns. Given its strategic importance for Indonesia's future, a robust terrorism prevention strategy is imperative to ensure the security of the new capital. This strategy involves the formulation of comprehensive policies and security plans, the development of a smart city that enhances anti-terrorism measures, and the strengthening of capabilities for terrorism mitigation.*

Keywords: *Prevention; Terrorism; IKN*

Abstraks: Terorisme adalah persoalan kompleks di tengah fenomena global saat ini. Terorisme sering diartikan juga sebagai tindakan kekerasan yang menargetkan warga sipil untuk mencapai tujuan politik maupun ideologi kelompok mereka. Aksi terorisme dilakukan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan, agar kepentingannya diakui dan dihormati. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak bisa lepas dari ancaman terorisme, terutama pasca peristiwa bom gedung *WTC* dan Bom Bali pada awal tahun 2000an lalu. Saat ini, terorisme menjadi ancaman baru seiring dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur. Lokasi IKN baru di Kalimantan Timur pada umumnya berdekatan dengan perbatasan antar negara, dan sekaligus berbatasan dengan berbagai wilayah yang rentan dengan aktivitas terorisme, termasuk keberadaan napiter, ex-napiter maupun simpatisan di sekitar wilayah tersebut. Sebagai suatu wilayah yang vital bagi negara Indonesia kedepannya, maka diperlukan strategi pencegahan terorisme untuk menciptakan keamanan IKN. Ini dilakukan dengan langkah-langkah persiapan kebijakan dan perencanaan pengamanan, hingga pembangunan *smart city* yang mendukung pengamanan anti terorisme, serta peningkatan kemampuan mitigasi terorisme.

Kata Kunci: Pencegahan; Terorisme, dan IKN

PENDAHULUAN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan langkah strategis dalam upaya pemerataan pembangunan serta mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial. IKN baru, yang akan dinamakan "Nusantara", dirancang sebagai kota modern dengan konsep *smart city* dan *green city* yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan serta inovasi teknologi. Namun, sebagai pusat pemerintahan baru, IKN juga menghadapi berbagai tantangan khususnya dalam aspek keamanan, salah satunya adalah ancaman serangan terorisme.

Terorisme merupakan salah satu ancaman keamanan nasional yang tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Sebagai simbol baru kedaulatan negara, IKN Nusantara sangat rentan menjadi target aksi terorisme oleh kelompok yang ingin menunjukkan kekuatan atau menyebarkan ketakutan di tengah masyarakat. Di Indonesia sendiri, sejumlah aksi terorisme yang pernah terjadi menunjukkan bahwa kelompok teroris terus beradaptasi dengan perubahan situasi dan teknologi. Peristiwa-peristiwa tersebut mengajarkan pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi berbagai bentuk ancaman yang mungkin timbul. IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru akan menjadi simbol kedaulatan negara, tempat berkumpulnya pemimpin negara, perwakilan diplomatik, dan fasilitas vital lainnya, sehingga keamanannya harus diprioritaskan.

Kalimantan Timur memiliki beberapan catatan peristiwa terkait serangan terorisme, hal ini menunjukkan bahwa wilayah ini tidak sepenuhnya aman dari ancaman teror. Salah satu catatan peristiwa yang pernah terjadi yaitu pada 13 November 2016 di Kota Samarinda, ketika serangan teror dengan melempar bom molotov meledak di halaman Gereja Oikumene saat berlangsungnya kebaktian Gereja oleh Juhanda alias Jo mantan narapidana terorisme dalam kasus teror bom buku tahun 2011. Insiden ini menyebabkan empat anak mengalami luka-luka, sementara satu korban meninggal dunia (Badriyanto, 2018).

Selain itu, rekam jejak aktivitas terorisme di Kalimantan Timur bahkan tercatat jauh sebelum peristiwa tersebut. Pada tahun 2003, Ali Imron, salah satu pelaku utama dalam peristiwa Bom Bali I, berhasil ditangkap saat bersembunyi di Delta Mahakam, Kutai Kartanegara (Merdeka, 2020). Tidak hanya itu, pelaku bom Samarinda juga ditemukan di wilayah yang sama. Jejak aktivitas teroris di Kalimantan Timur terus berlanjut, terbukti dengan penangkapan terduga teroris terkait jaringan JAD (Jamaah Ansharut Daulah) oleh Densus 88 Antiteror Polri pada 20 Maret 2019 di Berau. Penangkapan ini berkaitan erat dengan aksi teror bom Sibolga yang terjadi pada tahun yang sama (Qadar, Nafiysul, 2019).

Berdasarkan catatan peristiwa dari berbagai kejadian/aktivitas terorisme yang terjadi, Kalimantan menjadi wilayah strategis dalam kapasitas persembunyian, perekrutan, pendanaan dan target amaliyah/aksi teror. Bisa dikatakan Kalimantan merupakan *safe house* untuk kelompok teroris dari kasus Bom Bali 1 hingga saat ini. Para pelaku teror yang melarikan diri dan transit/bersembunyi ke Kalimantan diantaranya Ali Imron, Mubarok, Umar Patek, Dulmatin, Yunus DKK, Sibgoh, Khaidir, Untung, Muhammad Aceng Kurnia, Agung, Juanda (kasus bom Gereja Oakalame) dan kelompok Abu Umar. Selain *safe house*, Kalimantan juga menjadi zona penyangga ekonomi kelompok teroris. Berdasarkan pengalaman pribadi penulis, banyak korporasi usaha maupun pribadi (karyawan Pertamina, karyawan Total dan perusahaan lain) yang menjadi donatur kelompok teroris hingga saat ini. Hal lain, Kalimantan juga menjadi jalur perlintasan favorit kelompok teroris untuk ke Philipina melalui jalur Kalimantan Utara, Sabah, Sandakan Malaysia, Tawi-Tawi dan Jolo Philipina (Sofyan, 2023).

Selain itu, dinamika sosial di Kalimantan Timur sebagai daerah yang multikultural juga perlu menjadi perhatian. Pemindahan pusat pemerintahan diprediksi akan membawa masuk

banyak pekerja dari berbagai daerah dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Jika tidak dikelola dengan baik, situasi ini berpotensi memicu gesekan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memprovokasi atau melakukan tindakan terorisme.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pencegahan serangan terorisme terhadap Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur dengan pendekatan komprehensif. Strategi ini mencakup penguatan intelijen, optimalisasi teknologi *smart city*, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya deteksi dini dan penanggulangan ancaman.

Adapun pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui jurnal ini adalah sebagai berikut:

1) Apa saja potensi ancaman terorisme terhadap IKN Nusantara di Kalimantan Timur?
2) Bagaimana strategi pencegahan terorisme yang efektif dan komprehensif dapat diterapkan pada IKN baru?
3) Apa peran teknologi dan pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme di IKN Nusantara?

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyusun kebijakan keamanan yang proaktif dan adaptif, sebagai salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menyusun strategi kontraterorisme untuk Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, sehingga keberlanjutan pembangunan dan keamanan Ibu Kota Negara baru dapat terjaga dengan baik.

METODOLOGI

Metode penelitian untuk melakukan penulisan tentang "Strategi Pencegahan Serangan Terorisme Terhadap Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur," adalah melalui jenis penelitian kualitatif deskriptif. Melalui wawancara, kajian literatur, dokumen dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan berkaitan dengan pengkajian secara teoritis dengan menggunakan referensi yang berkaitan dengan nilai, norma, dan praktik yang tercipta dalam situasi sosial yang diteliti. Ada tiga kriteria dalam teori yang menjadi landasan penelitian: relevansi, kekinian, dan validitas. Relevansi memiliki arti bagaimana konsep yang dipertimbangkan sama atau satu tema dengan permasalahan yang diteliti. Kekinian secara umum mengacu pada sumber paling baru. Sumber pustaka dari jurnal atau internet sebagai referensi untuk memberikan landasan pendapat terhadap penelitian yang dilakukan. Sementara, validitas berkaitan dengan keaslian sumber, dalam artian peneliti menggunakan sumber asli untuk menyajikan teori (Hardani, dkk, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

Sejak beberapa tahun lalu, negara Indonesia memiliki misi baru terkait dengan komitmen melakukan pemindahan ibu kota negara Indonesia. Pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur telah resmi ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (Ibu Kota Negara). Lebih jauh, hal ini juga disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dilaksanakan pada awal tahun 2022. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur sejalan dengan visi pemerintah Indonesia untuk pembangunan yang tidak berorientasi pada *"Jawa-sentris",* namun lebih pada *"Indonesia-sentris."* Lokasi baru yang dikenal dengan nama IKN (Ibu Kota Nusantara) ini dikembangkan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) (Kapiarsa, 2020).

Sehubungan dengan hal ini, pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan atas beberapa dorongan urgensi, diantaranya (BAPPENAS, 2021):

1) Pesatnya pertumbuhan urbanisasi mengakibatkan meningkatnya kemacetan dan buruknya kualitas udara di Jakarta.
2) Tingginya jumlah penduduk diiringi dengan semakin banyaknya pergerakan penduduk yang keluar masuk Jakarta. Pada tahun 2013, kota Jakarta menduduki peringkat 10 kota terpadat di dunia (PBB, 2013). Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2017, kota ini naik ke posisi ke-9 sebagai salah satu kota terpadat di dunia (WEF, 2017).
3) Menurunnya ketahanan lingkungan hidup Jakarta, termasuk tingginya tingkat pencemaran, diiringi dengan naiknya permukaan air laut.
4) Ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan penurunan permukaan tanah membayangi Jakarta. Diketahui sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahun (minimal ideal untuk kota besar adalah 50 tahun). Kemudian, terjadi penurunan tanah sebesar 35-50 cm pada periode 2007-2017.

Ancaman Terorisme Terhadap Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur

Saat ini, terorisme telah menjadi fenomena global sehingga merupakan ancaman yang sangat berdampak terhadap keamanan nasional serta perdamaian dan stabilitas regional dan global, termasuk Indonesia (Ajie, 2024). Terorisme di Indonesia pada umumnya memiliki motif dan koneksi berlatar belakang agama dan ideologi untuk melakukan aksinya. Dalam hal ini, terorisme menjadi tantangan sekaligus ancaman hingga saat ini (Mubarak, 2012). Aksi terorisme dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama yaitu terorisme yang bersifat fisik biasanya mengakibatkan cacat secara fisik (pada tubuh) bahkan kematian seseorang, misalnya penyerangan, pembunuhan, pengeboman dan lain-lain, yang kedua terorisme non fisik (psikologis) dapat terjadi melalui rumor, ancaman, penyaderaan, intimidasi dan lain-lain (Muzakkir, 2008).

Terorisme merupakan aksi kekerasan atau ancaman kekerasan yang menciptakan suasana ketakutan yang meluas. Biasanya, hal ini mengakibatkan jatuhnya korban massal dan/atau sasaran strategis yang signifikan menjadi rusak atau hancur, sehingga berdampak pada lingkungan, ruang publik, atau lembaga ideologi internasional. Tindakan terorisme ini juga dapat menimbulkan gangguan politik atau keamanan (Wahid, 2018). Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak dari aksi aksi terorisme. Beberapa peristiwa pemboman besar seperti yang terjadi di Legian Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, peristiwa pemboman di Hotel Marriott pada tanggal 5 Agustus 2003 dan aksi aksi teror lainnya di Indonesia, telah menjadi rujukan pentingnya tindakan yang efektif, cepat, dan tepat untuk menyikapi terorisme sebagai isu global secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak (Ajie, 2018).

Terorisme di Indonesia berakar pada teologi, ideologi, dan jaringan sehingga kondisi tersebut memberikan motivasi dan ketahanan yang kuat kepada mereka. Hingga saat ini, terorisme masih menjadi tantangan dan ancaman besar bagi ketahanan nasional (Mubarak, 2012). Dalam hal ini Indonesia telah diakui sebagai salah satu negara yang sangat potensial dijadikan sebagai target perekrutan jaringan dan kegiatan terorisme, sebagaimana dijelaskan oleh Mubarak (2012), yaitu:

1) Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia, sehingga potensi berkembangnya ideologi transnasional dengan latar belakang Ideologi Islam garis keras lebih mudah berkembang.
2) Dipengaruhi oleh aspek geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luasnya wilayah sehingga memudahkan mobilitas jaringan terorisme dan cenderung sulit untuk dilacak.
3) Faktor sosial-ekonomi seperti aspek kemiskinan dan marjinalisasi yang dialami oleh pelaku/jaringan teror menjadi alasan penguat, dipadukan dengan iming iming surga sebagai doktrin/pemahaman jihad.
4) Patron/karisma tokoh yang menyebarkan doktrin Ideologi kepada masyarakat.

5) Fanatisme sempit dan tingkat pendidikan mempengaruhi pemahaman mereka tentang Idiologi kekerasan.

Ancaman terorisme menjadi sangat berbahaya karena jaringan terorisme terus melakukan inovasi strategi dan mengembangkan taktis-teknis baru. Inovasi didorong oleh peningkatan lingkungan keamanan, kebutuhan untuk mengatasi hambatan baru, dan dorongan untuk mendapatkan keuntungan. Menanggapi tantangan baru, kelompok teroris berinovasi dalam taktik, teknologi, dan strategi untuk meningkatkan efektivitas dan kemampuan beradaptasi. Mereka juga menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan keamanan, meningkatkan kreativitas dan fleksibilitas dalam perencanaan serangan, dan memanfaatkan media sosial dan propaganda untuk memperluas pengaruhnya. Melalui inovasi tersebut, teroris menjadi lebih sulit dideteksi dan efektif dalam merencanakan dan melaksanakan serangan, sehingga meningkatkan potensi kerusakan dan dampak yang ditimbulkannya (Parmadi & Riyanta, 2024).

Terkait dengan hal ini, pemindakan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur pada dasarnya juga memiliki potensi ancaman terorisme. Lokasi baru IKN di Kalimantan Timur terletak dekat dengan perbatasan negara. Hal ini dinilai sebagai titik strategis penyebaran ancaman radikalisme dan terorisme, mengingat lokasinya berada di segitiga: Sulu, Sabah, dan Poso (Apriliasari & Priyanto, 2024). Wilayah Poso merupakan satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang paling rentan terhadap potensi ancaman terorisme, terakhir keberadaan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan Santoso yang hampir 11 tahun melakukan berbagai aksi teror dengan strategi gerilya. Fakta ini nantinya harus mengarahkan perhatian pada kota-kota pendukung IKN, seperti Balikpapan dan Samarinda, di mana kota-kota tersebut berpotensi menjadi tujuan terorisme lintas batas. Selain itu, wilayah Kalimantan Timur dinilai sebagai salah satu wilayah yang dinilai memiliki kerawanan terhadap aktivitas terorisme karena berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan yang juga rentan terhadap isu radikalisme dan terorisme (Ahmad & Meliana, 2023).

Di Kalimantan Selatan, prevalensi radikalisme di kalangan masyarakat cukup tinggi dengan skor 55,5 dari 100. Sementara di Kalimantan Utara terdapat beberapa terpidana teroris dan mantan narapidana teroris, sehingga membuktikan bahwa keberadaan jaringan teror aktif di sana. Di sisi lain, Kalimantan Timur juga terdapat sedikitnya 21 orang jaringan kelompok teror, dua orang narapidana terorisme, 15 orang mantan narapidana terorisme, dan empat orang simpatisan. Di wilayah Kalsel (Kalimantan Selatan), total ada 19 orang yang tergabung dalam jaringan kelompok teror. Diantaranya, 7 orang merupakan Narapidana terorisme, 1 orang eks napiter, dan 11 orang sisanya merupakan simpatisan. Dalam hal ini, kegiatan utama mereka adalah penguatan sel-sel baru jaringan kelompok radikal terorisme, yang dilakukan melalui sosialisasi doktrin radikal terorisme. Selain itu, mereka pun mendaftarkan anaknya ke sekolah/pesantren radikal dan mengikuti kegiatan yang mengarah pada penguatan pemahaman radikal terorisme (Ahmad& Meliana, 2023).

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan hanya berkaitan dengan aspek pembangunan fisik dan pemerataan ekonomi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam hal keamanan, khususnya potensi serangan terorisme. Sebagai simbol baru kekuasaan negara, IKN akan menjadi pusat pemerintahan dan diplomasi, sehingga berpotensi menjadi target strategis bagi kelompok teror. Hal yang demikian bisa terjadi karena ibu kota negara adalah lambang peradaban suatu negara, ditandai dengan penempatan institusi dan lembaga pemerintahan, lembaga hukum, dan beragam aktifitas sosial ekonomi. Infrastruktur perkotaan menunjukkan layanan yang saling terhubung, namun keterhubungan ini membuat kota rentan terhadap berbagai aksi kejahatan. Salah satunya adalah ancaman terorisme yang mana dampak spasial dan pola terorisme perkotaan semakin menarik perhatian selama dua dekade terakhir (Mirza & Rana, 2023).

Berikut ini adalah beberapa potensi ancaman terorisme yang dapat terjadi:

1) Ancaman Serangan Bom dan Aksi Teror Fisik
   Serangan bom dan aksi teror fisik merupakan bentuk ancaman paling nyata, mengingat daya ledak dan dampaknya yang sangat merusak. Potensi ini muncul karena:
   a) Simbol Kekuasaan; Sebagai pusat pemerintahan baru, IKN akan merepresentasikan simbol kekuasaan negara, sehingga menjadi target potensial bagi kelompok teroris yang ingin menunjukkan eksistensi atau melakukan protes simbolik.
   b) Kerentanan Infrastruktur; Pada tahap awal pembangunan, infrastruktur yang belum sepenuhnya kokoh dapat menjadi titik lemah, terutama pada fasilitas vital seperti gedung pemerintahan, pusat pertemuan internasional, dan instalasi strategis.
   c) Aksi Lone Wolf; Ancaman dari individu atau kelompok kecil yang bertindak sendiri *(lone wolf)* juga tidak bisa diabaikan, mengingat potensi infiltrasi ke area publik atau lokasi keramaian.
   d) Serangan bom di area publik seperti terminal, stasiun, atau gedung pemerintahan pernah terjadi di beberapa negara dan berdampak besar pada stabilitas dan keamanan.
2) Ancaman Teror Siber
   IKN akan mengadopsi konsep *"smart city"* dengan integrasi teknologi digital yang kuat, seperti sistem administrasi berbasis cloud, pengawasan berbasis AI, dan jaringan komunikasi terpadu. Hal ini membuka celah ancaman terorisme siber, di antaranya:
   a) Peretasan Sistem Pemerintahan; Mengambil alih data sensitif, merusak infrastruktur digital, atau menyebarkan informasi palsu untuk menciptakan kepanikan publik.
   b) Serangan Ransomware; Mengunci data penting dan meminta tebusan sebagai bentuk tekanan politik atau finansial.
   c) Pemutusan Jaringan Penting; Melumpuhkan jaringan transportasi cerdas, jaringan listrik, atau jaringan komunikasi publik sehingga menimbulkan kekacauan besar.
   d) Serangan siber pada sistem kelistrikan dan infrastruktur transportasi di beberapa negara telah membuktikan bahwa serangan non-fisik bisa berdampak sama parahnya dengan aksi teror fisik.
3) Ancaman Propaganda dan Radikalisasi Digital
   Media sosial dan platform daring menjadi sarana efektif bagi kelompok teroris untuk menyebarkan propaganda, merekrut anggota baru, dan meradikalisasi masyarakat. Beberapa bentuk ancaman ini meliputi:
   a) Penyebaran Hoaks dan Provokasi; Menggunakan berita palsu untuk memecah belah masyarakat atau menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
   b) Perekrutan Online; Kelompok radikal memanfaatkan ketidakpuasan sosial untuk menarik simpati dan dukungan terhadap ideologi mereka.
   c) Penggalangan Dana Ilegal; Mengumpulkan dana melalui platform digital yang sulit dideteksi oleh aparat keamanan.
   d) Jika propaganda ini tidak ditangani dengan baik, bisa memicu gelombang radikalisasi di kalangan masyarakat lokal, termasuk di sekitar wilayah IKN.
4) Ancaman Infiltrasi dan Sabotase dari Dalam
   Selain ancaman eksternal, ancaman dari dalam juga tidak bisa diabaikan, seperti:
   a) Infiltrasi Aparatur Negara; Oknum pegawai atau aparat yang telah terpapar paham radikal bisa menyalahgunakan akses untuk melakukan sabotase atau memfasilitasi serangan.
   b) Penyalahgunaan Wewenang; Terorisme berbasis “orang dalam” sangat berbahaya karena bisa mengakses informasi strategis dan melakukan sabotase dari dalam sistem pemerintahan.
   c) Beberapa kasus di luar negeri menunjukkan adanya keterlibatan oknum aparat dalam aksi terorisme, sehingga penting adanya sistem screening dan pembinaan yang ketat.

5) Ancaman Ekstremisme Lingkungan dan Kelompok Anti-Pemerintah
Proses pemindahan IKN dapat menimbulkan gesekan sosial, baik dengan masyarakat adat, kelompok lingkungan, maupun pihak lain yang merasa dirugikan. Hal ini dapat memicu:
   a) Aksi Ekstremis Pro-Lingkungan; Melakukan sabotase pembangunan atau fasilitas pemerintah sebagai bentuk protes.
   b) Kelompok Anti-Pemerintah; Kelompok yang tidak sepakat dengan pemindahan IKN dapat melakukan aksi kekerasan sebagai bentuk penolakan.
6) Ancaman dari Kelompok Teroris Transnasional
Dengan posisi geografis yang strategis, Kalimantan Timur bisa menjadi sasaran kelompok teroris internasional yang memanfaatkan wilayah perbatasan dan akses laut.
   a. Penyelundupan Senjata; Lewat jalur laut atau sungai untuk memasok persenjataan ke dalam negeri.
   b. Keterkaitan dengan Jaringan Global; Teroris internasional dapat bekerja sama dengan kelompok lokal untuk memperkuat serangan terhadap IKN.
7) Cross Border Terrorism

Cross-border terrorism terjadi akibat lemahnya sistem pertahanan dan keamanan di perbatasan negara, yang memungkinkan pergerakan kelompok radikal dan teroris melintasi wilayah dengan relatif mudah. Dalam konteks Indonesia, lokasi geografis Kalimantan Timur yang berbatasan dengan segitiga Filipina, Sarawak, dan Poso semakin meningkatkan risiko ancaman terhadap keamanan nasional. Wilayah-wilayah tersebut telah lama dikenal sebagai daerah yang sering menjadi tempat berkembangnya gerakan radikal dan kelompok teroris. Jika tidak diantisipasi dengan baik, hal ini dapat mengganggu stabilitas geopolitik di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai perbandingan, kawasan Asia Selatan, terutama perbatasan antara Pakistan-Afghanistan dan Indo-Pakistan, telah menjadi pusat aktivitas kelompok teroris sejak pecahnya perang Indo-Pakistan yang dipicu oleh sengketa Kashmir. Pakistan, dalam hal ini, menjadi target empuk bagi kelompok radikal untuk menjadikan wilayahnya sebagai basis operasi mereka (Bakker et al., 2020). Berangkat dari pengalaman tersebut, Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara harus merancang strategi yang matang untuk mencegah pergerakan kelompok radikal dan teroris, terutama menjelang perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Beberapa peristiwa menunjukkan bahwa ancaman *cross-border* terrorism terhadap IKN bukanlah hal yang bisa diabaikan. Menurut riset Wirawan (2022), meskipun IKN Nusantara relatif aman sebagai ibu kota baru, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional. Kalimantan Timur sendiri telah lama menjadi lokasi aktivitas kelompok teroris. Contohnya adalah pelaku bom Gereja Oikumene, Muhammad Aceng Kurnia, yang diketahui merupakan anggota JAD Kaltim (JPNN, 2016). Posisi Kalimantan Timur yang berdekatan dengan Sabah-Sarawak dan Poso semakin memperkuat kerentanannya terhadap infiltrasi kelompok radikal yang berpotensi mengancam stabilitas geopolitik di Asia Tenggara.

Selain itu, penangkapan terduga teroris jaringan ISIS di Sambas, Kalimantan Barat, oleh Densus 88 menjadi indikasi nyata bahwa ancaman terorisme internasional telah menyebar hingga ke Kalimantan. Dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN Nusantara, potensi ancaman tersebut semakin meningkat karena IKN akan menjadi pusat pemerintahan yang memiliki nilai strategis dan simbolis. Kelompok teroris dapat menjadikan IKN sebagai target serangan, mengingat kedekatan geografisnya dengan daerah-daerah yang telah teridentifikasi sebagai basis jaringan terorisme. Dalam konteks ini, Kalimantan Timur sangat rentan menjadi tempat kaderisasi dan persembunyian kelompok bersenjata ilegal yang terorganisir, sehingga diperlukan langkah-langkah

pencegahan yang lebih ketat guna memastikan keamanan dan stabilitas ibu kota baru Indonesia.

Posisi Kalimantan Timur sebagai bagian dari Mantiqi Tsalis (wilayah III) dalam struktur operasi Jemaah Islamiyah (JI) telah lama menambah kompleksitas tantangan keamanan di wilayah ini. Berdasarkan pemetaan jaringan JI, Mantiqi Tsalis mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sabah, dan Mindanao, yang secara strategis dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan militan, termasuk perekrutan, pelatihan, dan distribusi logistik.

Kalimantan Timur sendiri memiliki peran khusus dalam strategi JI, terutama sebagai kamp pelatihan pendukung bagi Kamp Hudaibiyah di Mindanao, yang menjadi basis utama bagi kelompok tersebut. Selain itu, wilayah ini juga berfungsi sebagai pusat militer utama bagi jaringan JI di Indonesia (Solahudin, 2013). Dengan fungsi ganda ini, Kalimantan Timur telah lama menjadi bagian dari ekosistem radikalisme dan terorisme di Asia Tenggara, yang berpotensi meningkatkan ancaman bagi stabilitas nasional, terlebih dengan ditetapkannya wilayah ini sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Keberadaan jaringan JI di Kalimantan Timur memperlihatkan bahwa kelompok ini tidak hanya berfokus pada aksi-aksi teror, tetapi juga memiliki strategi jangka panjang dalam membangun infrastruktur militernya. Dengan demikian, perpindahan ibu kota ke wilayah ini harus diikuti dengan peningkatan kewaspadaan dan penguatan sistem keamanan untuk mencegah kemungkinan infiltrasi kelompok radikal yang masih memiliki jejak sejarah di daerah tersebut.

Pembahasan

Berhubungan dengan penjelasan sebelumnya, IKN di Kalimantan menjadi salah satu lokasi vital di masa depan sebagai pusat ibu kota negara Indonesia. Sebagai wilayah yang vital, ancaman terorisme menjadi salah satu permasalahan yang harus diantisipasi dan dipikirkan secara komprehensif. Oleh karenanya, pembangunan strategi pencegahan terorisme dianggap sebagai sesuatu yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia.

Pemilihan Kalimantan sebagai salah satu pusat kegiatan terorisme di Asia Tenggara telah dimulai sejak 2002 oleh Lashkar Jundullah, dengan tiga alasan utama. Pertama, Kalimantan memiliki konsentrasi militer yang rendah dengan wilayah yang sangat luas (Conboy, 2006). Dalam konteks wilayah Kalimantan yang terdiri dari lima provinsi, hanya terdapat dua Komando Daerah Militer (Kodam) yang bermarkas di Balikpapan dan Pontianak, lima Polisi Daerah (Polda) yang tersebar di setiap provinsi, dua Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut yang terletak cukup jauh dari IKN baru, yaitu di Tarakan dan Pontianak, serta enam Lanud.

Kedua, kondisi geografis Kalimantan yang berbukit dan tertutup hutan membuatnya ideal sebagai basis militer. Sebagian besar wilayah Kalimantan adalah daratan yang diselimuti hutan. Menurut data statistik, luas wilayah Kalimantan mencapai 743.440-kilometer persegi, dilintasi oleh setidaknya 58 sungai besar, dengan 39% dari total luas wilayahnya berupa pegunungan dan perbukitan.

Ketiga, kedekatan Kalimantan Timur dengan wilayah basis jaringan teroris lainnya di Asia Tenggara, seperti Mindanao dan Sabah, menjadikan wilayah ini sangat strategis secara geografis. Nasir Abbas dalam satu kesempatan menyebutkan bahwa Kalimantan sebagai *Mantiqi Tsalis* memainkan peran penting dalam pengembangan jaringan terorisme di Asia Tenggara. Hal ini dapat kita lihat pada kasus Ali Fauzi (perakit bom Bali) yang pernah mendirikan kamp Hudaibiyah di Mindanao pada 2002 (Ummah, 2019).

Selain Jamaah Islamiyah, secara ideologis, kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang beroperasi di Kalimantan Timur memiliki kesamaan pandangan dan tujuan dengan kelompok militan di Filipina selatan, seperti Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan Abu Sayyaf (Tempo, 2017). Gunaratna (2016) menegaskan bahwa keberadaan struktur

kepemimpinan ISIS di kawasan Mindanao, Kalimantan, Sabah, dan Sulawesi merupakan ancaman nyata terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Ketiga faktor ini semakin memperkuat potensi ancaman bagi Ibu Kota Negara (IKN) baru, yang berlokasi di tengah hutan Kalimantan Timur dan jauh dari kota-kota penyangga utama, di mana infrastruktur pertahanan dan keamanan yang telah mapan sebelumnya belum tentu tersedia secara optimal.

Selain berperan sebagai daerah pendukung dalam aktivitas pelatihan militer, Kalimantan Timur juga memiliki fungsi strategis sebagai pusat logistik utama bagi jaringan Jemaah Islamiyah (JI). Peran wilayah ini dalam mendukung aktivitas kelompok tersebut bahkan diakui oleh Nasir Abbas, seorang mantan anggota Jemaah Islamiyah, yang menyoroti betapa pentingnya Kalimantan Timur dalam rencana besar kelompok tersebut. Menurutnya, wilayah ini bukan sekadar tempat transit atau penyimpanan logistik semata, tetapi juga menjadi area kunci yang ditargetkan untuk mewujudkan visi mereka dalam mendirikan negara Islam yang dicita-citakan. Hal ini semakin menegaskan bahwa Kalimantan Timur memiliki nilai strategis yang sangat tinggi dalam operasional Jemaah Islamiyah, baik dari segi logistik maupun perencanaan jangka panjang (Safrudin, 2018).

Sebagai ibu kota negara Indonesia, IKN, seperti halnya kota-kota di seluruh dunia, harus menerapkan beragam tindakan kontraterorisme perkotaan untuk melindungi bangunan, ruang publik, dan warga negara dari aksi terorisme. Dengan mempertimbangkan latar belakang historis dan geografis yang telah disebutkan, penguatan strategi keamanan di IKN menjadi suatu keharusan guna mengantisipasi potensi ancaman yang dapat timbul di masa mendatang . (Jore&Lid, 2023). Dalam menghadapi potensi ancaman terorisme di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, diperlukan strategi yang komprehensif dan berlapis. Strategi ini harus mencakup aspek fisik, digital, sosial, dan koordinasi lintas sektor. Berikut adalah hal hal terkait strategi pencegahan terorisme di IKN:

1) Penguatan Keamanan Fisik dan Infrastruktur Vital
   Keamanan fisik merupakan elemen mendasar dalam mencegah serangan terorisme, terutama pada infrastruktur vital di IKN. Upaya yang dapat dilakukan meliputi:
   a) Sistem Pertahanan Berlapis *(Layered Defense)*
      1) Zona Pengamanan Berjenjang; Membagi wilayah IKN menjadi beberapa zona keamanan (zona inti, zona aman, dan zona publik) dengan pembatasan akses secara bertingkat.
      2) Pos Pemeriksaan *(Checkpoint)*; Dilengkapi dengan pemindai canggih, seperti detektor logam, deteksi bahan peledak, dan identifikasi biometrik.
      3) Penjagaan Perimeter; Menggunakan pagar anti-terorisme, kawat berduri, dan kamera pengawas di titik-titik kritis.
   b) Penerapan Teknologi Canggih dalam Keamanan
      1) CCTV Berbasis Kecerdasan Buatan (AI); Mampu mendeteksi perilaku mencurigakan dan memberikan peringatan dini.
      2) Drone Pengawas; Mengawasi area luas secara real-time, terutama di titik-titik yang sulit dijangkau.
      3) Sistem Pemantauan Terpadu; Mengintegrasikan semua data pengawasan ke pusat komando untuk respon cepat.
   c) Pelatihan dan Simulasi Terorisme
      1) Simulasi Penanganan Terorisme; Melibatkan aparat keamanan dan masyarakat dalam latihan evakuasi dan penanggulangan serangan.
      2) Peningkatan Kapasitas Aparat; Melatih personel TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam teknik antiteror modern.

2) Pencegahan Ancaman Siber pada IKN Cerdas *(Smart City)*
IKN baru akan mengadopsi konsep kota pintar yang bergantung pada teknologi digital. Oleh karena itu, keamanan siber harus menjadi prioritas utama.
a) Sistem Keamanan Siber Terintegrasi
1) Firewall Berlapis; Melindungi jaringan dari akses yang tidak sah.
2) Enkripsi Data Pemerintahan; Mengamankan informasi sensitif dari ancaman peretasan.
3) Pemantauan *Real-Time*; Menggunakan teknologi AI untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di jaringan digital.
4) Pusat Operasi Keamanan Siber *(Security Operations Center/SOC)*
b) Pendeteksian Dini dan Respon Cepat
1) Mengidentifikasi dan menangani serangan siber sebelum berdampak luas.
2) Tim Tanggap Darurat Siber *(Cyber Emergency Response Team)*; Siap merespon serangan ransomware, DDoS, atau peretasan data.
c) Edukasi dan Pelatihan Siber
1) Pelatihan bagi ASN dan Aparat Keamanan; Meningkatkan literasi digital dan kesadaran keamanan siber.
2) Simulasi Serangan Siber; Melatih kesiapan aparat dalam menangani situasi kritis.

3) Pendekatan Sosial dan Deradikalisasi
Pendekatan sosial sangat penting dalam mencegah radikalisasi yang bisa memicu aksi teror. Strategi sosial melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan IKN.
a) Program Deradikalisasi dan Rehabilitasi
1) Pembinaan Mantan Napiter (Narapidana Teroris); Melalui program pemberdayaan ekonomi dan sosial agar tidak kembali ke jaringan teror.
2) Kampanye Anti-Radikalisme; Menggunakan media sosial dan pendidikan untuk menyebarkan narasi damai dan toleransi.
b) Peningkatan Literasi Digital di Masyarakat
1) Pencegahan Propaganda Ekstremis; Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali hoaks dan propaganda terorisme.
2) Kerjasama dengan Tokoh Agama dan Adat; Menyampaikan pesan perdamaian dan menjaga kerukunan sosial.
c) Penguatan Identitas Nasional dan Kebangsaan
Kegiatan Kebangsaan dan Kemanusiaan; Meningkatkan rasa cinta tanah air dan persatuan, sehingga mencegah infiltrasi ideologi radikal.

4) Kolaborasi Lintas Sektor dan Intelijen Terpadu
Ancaman terorisme membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mengatasinya secara efektif.
a) Koordinasi Antar Lembaga
1) BNPT, BIN, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah; Bekerja sama dalam menyusun rencana pengamanan dan pencegahan.
2) Pertukaran Data Intelijen; Memastikan adanya komunikasi cepat dan akurat antar lembaga keamanan.
b) Keterlibatan Masyarakat dalam Keamanan Terpadu
1) Program Keamanan Lingkungan; Mengaktifkan sistem keamanan berbasis komunitas (*community policing*).
2) Hotline Anti-Terorisme;Masyarakat dapat melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan.
c) Kerja Sama Internasional
1) Pertukaran Informasi Intelijen Global; Memonitor pergerakan teroris lintas negara.

2) Pelatihan Bersama dengan Negara Sahabat; Melakukan latihan antiteror dalam kerangka kerja sama keamanan internasional.

5) Penerapan Teknologi Mutakhir dan Inovasi Keamanan
Pemanfaatan teknologi modern sangat penting dalam menjaga IKN dari ancaman terorisme.
   a) Sistem Pemantauan Otomatis
      1) Penggunaan CCTV dengan Pengenalan Wajah (*Face Recognition*); Mengidentifikasi orang yang masuk ke area terlarang.
      2) Pemantauan Kendaraan Otomatis; Memeriksa nomor plat kendaraan dan mendeteksi anomali.
   b) Sistem Prediksi Kejahatan Berbasis AI
      1) Analisis Data Besar (*Big Data*); Mengidentifikasi pola yang mencurigakan dari pergerakan massa atau aktivitas digital.
      2) Peringatan Dini Berbasis AI; Mendeteksi ancaman melalui analisis percakapan di media sosial atau aplikasi pesan.
6) Kebijakan dan Regulasi Pendukung
   a) Regulasi Anti-Terorisme yang Tegas
      1) Peningkatan Sanksi Hukum bagi Teroris; Menguatkan hukum pidana terorisme untuk meningkatkan efek jera.
      2) Peraturan Keamanan Siber; Menjamin perlindungan data negara dari ancaman siber.
   b) Rencana Kontinjensi dan Pemulihan Pasca-Serangan
      1) Protokol Krisis; Panduan bagi pemerintah dan masyarakat jika terjadi serangan.
      2) Manajemen Risiko dan Pemulihan; Memastikan bahwa IKN dapat pulih dengan cepat dari serangan yang mungkin terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan isu global yang juga menjadi permasalahan serius di Indonesia. Ada tiga periode besar terkait serangan teroris di Indonesia, yaitu periode tahun 2001, periode serangan teroris di Bali yang disebut dengan BOM Bali 1, periode tahun 2012an diwarnai dengan aksi teror berupa perampokan yang diistilahkan oleh kelompok teroris sebagai *Fa'i* dan pembunuhan terhadap aparat oleh kelompok Jamaah Ansharu Daulah (JAD), dan terakhir periode pertengahan tahun 2018 dengan peristiwa kerusuhan Rutan Mako Brimob Kelapa dua Depok dan bom bunuh diri keluarga di Surabaya. Kini, Indonesia dihadapkan pada tantangan ancaman terorisme baru, terkait dengan progres pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Sebagai salah satu obyek vital yang baru, IKN di Kalimantan Timur ini pada dasarnya harus mempersiapkan sistem keamanan wilayah untuk menghadapi dan mengantisipasi ancaman terorisme. Hal ini didasarkan pada posisi IKN di Kalimantan Timur yang berdekatan dengan perbatasan negara, dan berbatasan dengan berbagai wilayah yang rentan dengan aktivitas terorisme.

Sebagai ibu kota negara, IKN harus menerapkan strategi pencegahan terorisme melalui langkah-langkah persiapan kebijakan dan perencanaan pengamanan. Konsep smart city yang diusung dalam pembangunan IKN Nusantara membuka peluang pemanfaatan teknologi canggih dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Teknologi seperti pengawasan berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), analisis data besar (*Big Data*), pemindai wajah, serta integrasi sistem keamanan digital dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi dan merespons ancaman secara cepat dan akurat. Namun, tantangan lain muncul dalam hal koordinasi antar lembaga dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi tersebut, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam hal mitigasi terorisme.

Strategi pencegahan terorisme di IKN Kalimantan Timur harus mencakup berbagai aspek: fisik, digital, sosial, dan koordinasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, dan komunitas internasional sangat diperlukan agar IKN dapat menjadi pusat pemerintahan yang aman dan kokoh. Dengan menerapkan teknologi canggih, penguatan literasi digital, serta kerja sama lintas lembaga, ancaman terorisme dapat diminimalisasi secara efektif.

REFERENSI

Achmad, N. M., & Meiliana, D. (2023, Maret 23). *Petakan Potensi Ancaman di IKN, TNI: Penyelundupan Narkoba, Radikalisme, dan Terorisme*. Retrieved from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2023/03/23/11262561/petakan-potensi-ancaman-di-ikn-tni-penyelundupan-narkoba-radikalisme-dan

Afriansyah, A., Ghozi, A., & Wargadalem, M. A. (2023). ndonesia's Laws and Policies in Combatting Terrorism Financing: An Update Analysis. *AML CFT Journal, 2*(1), 1-18.

Aji, A. M. (2013). Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum). *Jurnal Cita Hukum, 1*(1).

Ajie, B. W. (2024). Changes in the Regulation of Terrorism Financing in Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism , 2*(2), 100-110.

Ansori, M. H., & dkk. (2019). *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan Dan Tantangan.* Jakarta: The Habibie Center.

Apriliasari, A. Y., & Priyanto, S. (2024). Ibu Kota Negara (IKN) dan Mitigasi Ancaman Terorisme: Pendekatan Kesejahteraan untuk Pencegahan Aksi Kejahatan di Indonesia. *UNES Law Review, 6*(4).

Araña, J. E., & León, C. J. (2008). The impact of terrorism on tourism demand. *Annals of Tourism Research, 35*(2), 299-315.

Bappenas. (2022). *Rencana Induk IKN dalam Lampiran UU IKN.*

Badriyanto. (2018). 7 Serangan Teorirs di Indonesia Tiga Tahun Terkahir, Nomor 5 Diwarnai 'Drama', Retrived from https://nasional.okezone.com/reaD/2 018/05/14/337/1897942/7-serangan- teroris-di-indonesia-tiga-tahun- terakhir-nomor-5-diwarnai-drama pada 11 november 2020.

Bakker, F. F., Putra, A. P., & Putri, R. T. (2020). The Role of ASEAN in Tackling the Main Issues of Transnational Crime in the Southeast Asia Region. Journal of Law and Border Protection, 2(1), 47–58. https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i1.182

BNPT . (2023, Oktober 13). *BNPT RI Bangun Kesiapsiagaan Nasional Wilayah IKN dari Ancaman Terorisme*. Retrieved from BNPT : https://www.bnpt.go.id/bnpt-ri-bangun-kesiapsiagaan-nasional-wilayah-ikn-dari-ancaman-terorisme

Borum, R. (2004). *Psychology of Terrorism.* Tampa: University of South Florida.

Conboy, K. J. (2006). The second front : inside Asia's most dangerous terrorist network.

Dedeche, A. (2014). *Protecting Organizational Knowledge: A Strategic Perspective Framework.* The University of Melbourne.

Gaibulloev, K., & Sandler, T. (2009). THE IMPACT OF TERRORISM AND CONFLICTS ON GROWTH IN ASIA. *Economics & Politics*.

Gunaratna, R. (2016, January). Islamic State branches in Southeast Asia. In *Pacific Forum* (Vol. 7).

Hardani, & dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.* Pustaka Ilmu: Yogyakarta.

IEP. (2024). *Global Terrorism Index 2024.* Institute for Economics & Peace: Measuring the impact of terrorism.

Jore, S. H., & Lid, S. (2023). Securing Cities in the Global War on Terrorism: The Case of Oslo. *Global War on Terrorism*.

JPPN. (2016). https://m.jpnn.com/news/harap-waspada-3-anggota-isis-kembali-ke-kalimantan-utara

Kapiarsa, A. B. (2020). Penanganan Potensi Ancaman Terorisme di Ibu Kota Baru Indonesia Studi Kasus: Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. *Jurnal Manajemen Pertahanan, 6*(2).

Kementrian PPN/Bappenas. (2021). *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara.* Jakarta: Kementrian PPN/Bappenas.

Merdeka. (2020). Kisah Dua Anak Bangkit Usai Jadi korban Bom Gereja di Samarinda 2016. Retrived from https://www.merdeka.com/peristiwa /kisah-dua-anak-bangkit-usai-jadi- korban-bom-gereja-di-samarinda- 2016.html?page=4 pada 11 november 2020

Mirza, M. N., & Rana, I. A. (2024). A systematic review of urban terrorism literature: Root causes, thematic trends, and future directions. *Journal of Safety Science and Resilience, 5*(3), 249-26. Retrieved from Journal of Safety Science and Resilience.

Monnier, C. (2024). *Why Should National Prevention Strategies Be in the Pact for the Future?* New York University Center on International Cooperation.

Mubarak, Z. (2012). Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan. *SALAM: Jurnal Studi Masyarakat Islam, 15*(2).

Mudzakkir. (2008). *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Terorisme.* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Mustofa, M. (2002). Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia, 2*(3), 30-38.

NATO. (2024). *Countering terrorism*. Retrieved from Nato: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_77646.htm

OHCHR. (2008). *Human Rights, Terrorism and Counter-terrorism.* Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

Parmadi, V., E. D., & Riyanta, S. (2024). Analysis of the Potential Threat of Indonesian Foreign Terrorist Fighters in Syria to Indonesia. *International Journal of Science and Society, 6*(3).

Pati, N. V. (2024). The Implementation of Law Enforcement In Combating Terrorist Financing in IndonesiaFinancing in Indonesia. *Indonesian Journal of International LawIndonesian Journal of International Law, 21*(2).

Pradnyana, I. P., & Rofii, M. S. (2020). Ancaman Cyberterrorism di Indonesia dan Respons Negara. *Literatus, 2*(2), 181-191.

Saputra, E. (2023). Sistem Pertahanan Dalam Menghadapi Ancaman di Wilayah IKN. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-112200000000081/swf/7529/PPRA%2064%20-%2068%20S.pdf

Solahudin. (2013). The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to Jem'ah Islamiyah. diedit oleh G. Fealy. New York: Cornell University Press

Qodar, Nafiysul. (2019). Densus 88 Ringkus Terduga TEroris di Kaltim Terkait Bom Sibolga. Retrived from https://www.liputan6.com/news/rea d/3921872/densus-88-ringkus- terduga-teroris-di-kaltim-terkait- bom-sibolga pada 11 November 2020

Schmid, A. P. (2023). *Defining Terrorism.* ICCT Report.

Sofyan, M. (2023). Wawancara pribadi peneliti dengan narasumber di Rumah moderasi. Depok, Jawa Barat.

Ummah, M. S. (2019). Membaca IKN Multidisiplin. In Sustainability (Switzerland) (Vol 11, Number 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbec

o.2008.06.005%0Ahtt
ps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRAT EGI_MELESTARI

UNODC. (2018). *Introduction To International Terrorism.* Vienna: United Nations.

Wahid, H. N. (2018). *Mengenal Radikalisme.* Surabaya: CV Saga Jawadwipa.

Yunanto, S. (2024). *Kebijakan Pengamanan Objek Vital Nasional.* Assoc.

Zuhri, S. (2017). Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT : Perspektif Spektrum Politik. *Jurnal Ilmu Kepolisian*.